

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjalanan panjang perekonomian Indonesia memang tak layak dikatakan mulus. Sejak mengikrarkan diri sebagai bangsa yang merdeka, silih berganti masalah dan rintangan seakan ingin menguji kelayakan strategi pembangunan ekonomi yang tengah berjalan. Diantara berbagai peristiwa tersebut, tak sedikit yang mampu dilalui dengan mulus dan tanpa hambatan namun tak sedikit juga yang melahirkan efek jangka panjang dan masih terasa hingga kini. Sebut saja inflasi besar-besaran yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan akibat banyaknya uang beredar di masyarakat.

Belum lagi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai kinerja elit pemerintahan yang mulai mencuat diakhir masa Orde Lama dan berlanjut di Orde Baru bahkan hingga saat sekarang ini. Salah satu bencana ekonomi yang menjadi pukulan telak bagi bangsa Indonesia yakni krisis ekonomi tahun 1997. Kemerosotan ekonomi yang terjadi tanpa gejala signifikan membuat banyak pihak tak bersiap diri menghadapi kondisi ini. Seperti dibahasakan dalam literatur yang dikemukakan Devi Putra (2009), bahwa diantara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai sampel penelitian, Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan akan terkena krisis bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga dijadikan sampel.

Peliknya persoalan yang timbul akibat krisis justru menguji ketahanan masyarakat. Beratnya bencana ini memang sulit untuk ditawar mengingat bahwa dampak krisis justru menyerang bagian-bagian vital dari kehidupan rakyat khususnya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Hasil survei yang dilakukan

Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik (September-Oktober 1998) menegaskan bahwa tiga persoalan utama yakni pengangguran, hilangnya penghasilan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau harus segera mendapatkan penyelesaian.

Ditengah kesibukan pemerintah dalam merumuskan langkah alternatif menghadapi krisis ekonomi saat itu, harapan yang lebih menjanjikan justru timbul dari sektor yang kurang diperhitungkan sebelumnya yakni sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Samuel Hasiholan (2011), ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya, keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menjalankan kinerjanya dalam mengelola modal usaha yang ada, dapat diamati berdasarkan informasi akuntansi yang disajikan yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 10, informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi pencapaian keberhasilan usaha, termasuk usaha kecil (Megginson : 2000). Informasi

akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi modal dasar bagi UKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, pengembangan harga, dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilya Andriani dkk (2014) Tentang Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon) menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;

- 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya,
- 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) tentang Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP menemukan bahwa, bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK ETAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siswantodan Sadjarto (2014) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Industri Kulit Di Surabaya. Menemukan bahwa, menunjukkan bahwa modal awal CV. X untuk menjalankan usahanya adalah sebesar Rp 50.000.000; Total aset tetap yang dimiliki CV. X adalah Rp 20.761.000; Pembelian persediaan bahan baku kulit CV. X yang terjadi selama bulan Mei-Juni 2014 adalah sebesar Rp 33.000.000, dengan jumlah Rp 18.750.000 yang belum dibayarkan kepada pemasok; Pembelian persediaan bahan baku pembantu selama bulan Mei-Juni 2014 adalah Rp 11.405.000; Formula untuk membuat produk wallet adalah sebesar Rp 135.540, formula produk Compact Wallet sebesar Rp 88.040, formula produk Gantungan Kunci sebesar Rp 22.270, dan formula produk Handbag sebesar Rp 78.700; Total penjualan yang dihasilkan pada bulan Mei adalah sebesar Rp 45.125.000,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memandang laporan keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atas penggunaan laporan keuangan pada asosiasi UMKM mutiara timur Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atas penggunaan laporan keuangan pada asosiasi UMKM mutiara timur makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis :
  - a) Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sistem kinerja keuangan yang baik.
  - b) Sebagai bahan informasi bagi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hal tentang kinerja keuangan pada masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Undang – Undang UMKM**

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah menjelaskan bahwa:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 selanjutnya membahas tentang bebarapan kriteria yakni:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memiliki klasifikasi sendiri terhadap skala usaha yakni berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 1-4 orang, sedangkan usaha kecil

adalah usaha yang memiliki pekerja 5-19 orang. Sedangkan Bank Indonesia sendiri memiliki indikator lain dalam menetapkan kategori suatu unit usaha. Bank Indonesia menetapkan kategori skala usaha berdasarkan indikator besarnya pembiayaan yang digunakan. Bank Indonesia mendefinisikan kategori usaha berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh perusahaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro ialah perusahaan yang menerima kredit dengan plafon kredit hingga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

## **2. Perkembangan UMKM di Indonesia**

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sektor atau antar subsector, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama. Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu:

### **a) Kesulitan Pemasaran**

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di

semua aspek yang terkait pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, cukup sulit bagi UMKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b) Keterbatasan Finansial

Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investas. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit maupun pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM.

c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala serius bagi banyak UMKM di Indonesia adalah keterbatasan SDM dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran dan lain sebagainya. Semua keahlian sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d) Masalah Bahan Baku Keterbatasan

Bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi UMKM di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga yang relative mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomu lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e) Keterbatasan Teknologi UMKM

Di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersigat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relative rendah.

f) Kemampuan Manajemen Keterbatasan

Pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g) Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah umkm di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. (data UMKM 2015, 2016, 2017).

Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8

juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini, UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015).

Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada

UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%.

Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.

### **3. Standar Akuntansi UMKM**

Secara umum, tujuan utama pengembangan standar akuntansi keuangan adalah agar pengguna dapat menerima laporan keuangan yang bisa dipahami dengan kualitas tinggi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas dan kebutuhan informasi penggunanya. Dengan demikian, prinsip pengembangan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan dan penyusunan SAK EMKM ini berangkat dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) sehingga diharapkan pengaturan yang ada dalam SAK EMKM ini akan jauh lebih sederhana. Namun, terdapat beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengembangan SAK EMKM misalnya FRS 105 tentang The Financial Reporting Standard applicable to the Micro-entities Regime yang diterbitkan oleh regulator independen Inggris dan Irlandia yang menyusun standar untuk standar pelaporan dan tata kelola perusahaan, Financial Reporting Council. Referensi utama lain yang digunakan adalah Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan ('Pedoman Umum'), yang merupakan produk hasil kerja

sama Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia. Pedoman Umum ini pada dasarnya terbagi atas dua pengaturan.

Perbedaan utama yang harus dipahami adalah bahwa usaha kecil yang berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum dapat memenuhi definisi entitas pelapor (*reporting entity*) sehingga menggunakan pedoman umum untuk usaha kecil badan usaha yang tidak berbadan hukum. Asumsi dasar yang digunakan dalam pedoman ini adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan usaha kecil berbentuk perorangan serta usaha mikro berbentuk perorangan dan badan usaha perorangan tidak memenuhi definisi entitas pelapor karena dianggap belum mampu memisahkan kekayaan pribadi dan usahanya sehingga dalam pencatatan transaksinya akan menggunakan pedoman umum untuk usaha mikro dan kecil perorangan. Asumsi dasar yang digunakan adalah dasar kas, sehingga pencatatan hanya diakui ketika terdapat penerimaan dan pengeluaran kas saja.

Sejak Agustus 2015 hingga saat ini bisa dibilang adalah masa-masa paling sibuk, khususnya bagi Lianny Leo, John Hutagaol, Singgih Wijayana dan Indra Wijaya, sebagai tim kecil DSAK IAI yang mengarungi penyusunan SAK EMKM ini. Karena akan menjadi program nasional, maka rapat pun hampir dilakukan beberapa kali dalam satu bulan oleh tim kecil tersebut. Dan untuk mendapatkan akseptabilitas yang tinggi atas produk ini, IAI juga telah membentuk *working group* yang beranggotakan regulator, asosiasi perbankan dan asosiasi UMKM terkait lainnya seperti Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (*Hipmikindo*), Asosiasi Pengusaha Indonesia (*Apindo*), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (*KADIN*) bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif.

Hingga saat ini, pertemuan working group telah dilakukan sebanyak tiga kali guna membahas beberapa masalah pelik dalam penyusunan SAK EMKM ini. Misalnya tentang ruang lingkup yang diusulkan untuk mencakup entitas mikro, kecil, dan menengah. Kebanyakan anggota merespon bahwa cakupan ruang lingkup ini terlalu luas sehingga pengaturannya nanti perlu dikelompokkan menjadi beberapa kluster. Selain itu juga membahas tentang asumsi dasar, komponen laporan keuangan lengkap, serta pengaturan rinci lain atas beberapa pos (seperti aset tetap, persediaan, dan pendapatan). Suasana diskusi beberapa kali berubah menjadi sengit karena beberapa anggota working group menyuarakan ketidaksetujuannya atas usulan yang disampaikan, khususnya yang terkait dengan asumsi dasar akrual; mempertimbangkan ruang lingkup yang dicakup terlalu luas, sehingga mengkhawatirkan posisi entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAK ini sama sekali belum mampu menerapkan SAK ini. IAI telah mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan anggota working group dan berupaya memberikan lebih banyak relaksasi untuk mempermudah EMKM dalam menerapkan SAK ini.

Rencananya, pada April 2016, IAI akan mengadakan konsinyering bersama dengan anggota working group untuk lebih memantapkan draf SAK EMKM ini sebelum disahkan menjadi eksposur draf dalam Pleno DSAK IAI. Eksposur Draf (ED) SAK EMKM ini diperkirakan akan menjadi produk standar perdana yang dikeluarkan oleh DSAK IAI pada tahun 2016 ini. Pastilah akan lebih seru untuk didiskusikan setelah ED SAK EMKM ini diterbitkan pada Kuartal I 2016.

#### 4. Laporan Keuangan UMKM (SAK ETAP)

##### a) Pengertian Laporan Keuangan

Menurut SAK (2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan secara umum merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan Keuangan suatu perusahaan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan/badan usaha selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan/badan usaha dalam menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya akan memberikan laba (*return*) untuk suatu periode tertentu (Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM 2009).

##### b) Tujuan Laporan Keuangan

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

##### c) Unsur-unsur Laporan Keuangan

Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.
4. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.

d) Peran Laporan Keuangan Bagi UMKM

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011.

Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK ETAP ini ke depannya tentu sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Menurut SAK ETAP, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (SAK ETAP, 2009).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Alftri dkk (2014) Tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Menemukan bahwa Pemahaman perajin mebel tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) masih rendah Pencatatan keuangan yang dilakukan perajin mebel hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan

masing-masing perajin mebel. Perajin mebel tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan, karena perajin mebel kurang memahami SAK-ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dkk (2014) Tentang Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan, Menemukan bahwa hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Krisyanti dan Mimbah (2014) Tentang Evaluasi Penerapan Sak Etap Atas Persediaan (Studi Kasus Pada PT.WKPI). Menemukan bahwa, akuntansi persediaan pada PT. WKPI telah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian itu tercermin dari perbandingan dan pengukuran persediaan PT. WKPI dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan pada SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Musmini (2013) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja) Menemukan bahwa saat ini sistem informasi akuntansi yang dimiliki usaha kecil masih sangat sederhana dan belum sistematis. Manajer tidak dapat mengetahui perkembangan dan kinerja usahanya dengan baik dari informasi ataupun catatan yang dimiliki saat ini. Sistem informasi akuntansi usaha kecil perlu ditata lebih baik, sehingga dapat

memberikan informasi tentang penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, harga pokok penjualan dan laba kotor untuk setiap periode. Tahap berikutnya, jika sistem manual tersebut sudah dirancang dengan output berupa informasi yang cukup memadai, maka sistem tersebut dapat dibuat dalam bentuk sistem informasi yang berbasis komputer. Pada sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, karyawan hanya melakukan input, selanjutnya program akan memproses data yang diinput, selanjutnya secara otomatis diperoleh output yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan manajer.

Penelitian yang dilakukan Wulanditya (2011) tentang Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Pengusaha UKM dengan SAK ETAP, Menemukan Bahwa Penegakan aturan pajak untuk UKM perlu dipersiapkan. Sebelumnya, pengusaha UKM diharuskan membayar pajak sebagai hasil dari perhitungan pendapatan kena pajak. Pengusaha UKM harus terlebih dahulu melakukan koleksi Program *bookkeeping*. Program pengumpulan pajak untuk UKM didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mereka menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Selisih Nilai Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukkan bagi UKM untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Salah satu kemudahan yang diberikan oleh SAK ETAP adalah tidak perlu untuk presentasi pajak. Dengan segala kemudahan dan kenyamanan, diharapkan UKM pengusaha mengembangkan kesadaran tentang perlunya pembukuan. Dengan memiliki akuntansi atau laporan keuangan, UKM akan dapat menilai dan mengevaluasi kinerja bisnis, memfasilitasi perolehan dana dari bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya, dan menghindari sanksi untuk non-kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Minuzu (2010) menjelaskan bahwa Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. Menemukan bahwa, faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, sosial ekonomi dan budaya, dan instansi terkait Aspek peran secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap faktor internal usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 0.980 (98%); (2), faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah, ekonomi social dan budaya, dan aspek peran instansi terkait harus secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap usaha kecil dan mikro kinerja dengan kontribusi sebesar 0.254 (25,4%); dan Faktor internal yang terdiri dari manusia sumber daya, keuangan, teknik produksi dan operasi, dan pasar atau pemasaran aspek secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil dan mikro dengan kontribusi sebesar 0.792 (79,2%).

Rudiantoro dan Siregar (2012) dengan judul penelitian Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Menemukan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK ETAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut.

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode & Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andriani Lilya, Atmadja Tungga Anantawikrama, Sinarwati Kadek Ni 2014	Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon)	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Paradigma interpretif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey pendahuluan untuk menggali informasi up to date dan untuk memperoleh gambaran tentang UMKM, wawancara mendalam (informan ditunjuk secara purposive sampling dan dengan snowball chain sampling), observasi terhadap praktik pencatatan keuangan, serta studi dokumen,	Keinginan atau niat yang dimiliki informasi untuk mengembangkan usaha, untuk mempermudah dalam penggajian telah memotivasi informan untuk selalu melakukan bentuk pencatatan keuangan seperti yang kini dilakukan oleh Peggy Salon, namun pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana dan dilakukan dengan cara manual. Tidak terlaksanannya pencatatan akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam UMKM tersebut, sedangkan faktor eksternal yakni tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak

				yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM (stakeholder) yakni dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator.
2	Rizki Rudiantoro, Sylvia Veronica Siregar (2012)	Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP	Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data dan Variabel ini dihitung dengan menilai jawaban responden	Penelitian ini memiliki persepsi bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Faktor ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi tersebut. Lama usaha berdiri justru berpengaruh negatif terhadap persepsi, berbeda dengan dugaan awal. Mungkin karena pada saat awal berdiri pengusaha berusaha memikirkan hal-hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan usahanya ke depan sehingga mereka lebih mempunyai persepsi yang baik akan pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan.

				<p>Sedangkan jenjang pendidikan terakhir beserta latar belakang pendidikannya tidak terbukti signifikan. Kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah kredit yang diterimanya.</p>
3	Siswanto Andreas, Sadjarto Arja (2014)	Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Industri Kulit Di Surabaya	Penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang dipelajari sebagai suatu kasus.	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal awal CV. X untuk menjalankan usahanya adalah sebesar Rp 50.000.000; Total aset tetap yang dimiliki CV. X adalah Rp 20.761.000; Pembelian persediaan bahan baku kulit CV. X yang terjadi selama bulan Mei-Juni 2014 adalah sebesar Rp 33.000.000, dengan jumlah Rp 18.750.000 yang belum dibayarkan kepada pemasok; Pembelian persediaan bahan baku pembantu selama bulan</p>

				Mei-Juni 2014 adalah Rp11.405.000; Formula untuk membuat produk wallet adalah sebesar Rp 135.540, formula produk Compact Wallet sebesar Rp 88.040, formula produk Gantungan Kunci sebesar Rp 22.270, dan formula produk Handbag sebesar Rp 78.700; Total penjualan yang dihasilkan pada bulan Mei adalah sebesar Rp 45.125.000, sedangkan pada bulan Juni sebesar Rp47.740.000.
4	Alfitri Arri, Ngadiman, Sohidin 2014	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, dimana sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah melainkan pada kedalaman informasi dari sampel sebagai sumber data.	Dari hasil wawancara yang di-lakukan terhadap perajin mebel Desa Gondangsari menunjukkan bahwa pemahaman perajin mebel tentang SAK-ETAP masih rendah. Sebagian besar perajin mebel mengaku tidak memahami dan tidak mengetahui secara langsung dari pihak yang berwenang tentang SAK-ETAP.
5	Pratiwi Ade Astalia,	Analisis Penerapan	Penelitian yang dilakukan ini	Pelaku UMKM umumnya telah

	Sondakh J. Jullie, Kalangi Lintje (2014)	Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan	adalah penelitian deskriptif-komparatif dimana peneliti mengumpulkan, menganalisa serta membandingkan penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan dengan SAK ETAP yang berlaku.	menerapkan akuntansi sederhana pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan mereka sedangkan pelaporan keuangan PT. Nichindo sudah lebih baik karena telah menerapkan sebagian SAK ETAP dalam penyajian Neraca dan Laporan Laba Rugi.
6	Kristayani Putu Luh Nih, Mimbah Harta Sri Putu Ni (2014)	Evaluasi Penerapan Sak Etap Atas Persediaan (Studi Kasus Pada PT.WKPI)	Penelitian ini menggunakan sistem deskriptif kuantitatif.	PT. WKPI sebagai badan usaha yang tergolong sebagai usaha menengah dengan kegiatan produksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga PT. WKPI menyadari pentingnya melakukan pencatatan akuntansi. Dengan melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar pencatatan yang diperuntukkan bagi perusahaan yang tergolong UMKM, maka PT. Wisnu Karya Putra Internasional dapat mengatur kegiatan produksi usahanya dengan baik, salah

				<p>satunya yang menjadi bahasan kali ini adalah persediaan. Dengan adanya standar pencatatan untuk persediaan, maka perusahaan dapat menggunakan informasi yang relevan untuk pembuatan suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan sehingga persediaan yang dimiliki PT. WKPI dapat dikelola dengan baik.</p>
7	Musmini Sri Lucy (2013)	Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil	Penelitian ini menggunakan sistem pembagian kuisioner dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif.	<p>Saat ini sistem informasi akuntansi yang dimiliki usaha kecil, khususnya pada Rumah Makan Taliwang Singaraja masih sangat sederhana dan tidak sistematis, dalam artian belum memadai, sehingga tidak dapat memberikan informasi bagi manajer untuk mengambil keputusan. Manajer tidak dapat melihat dengan baik perkembangan dan kinerja</p>

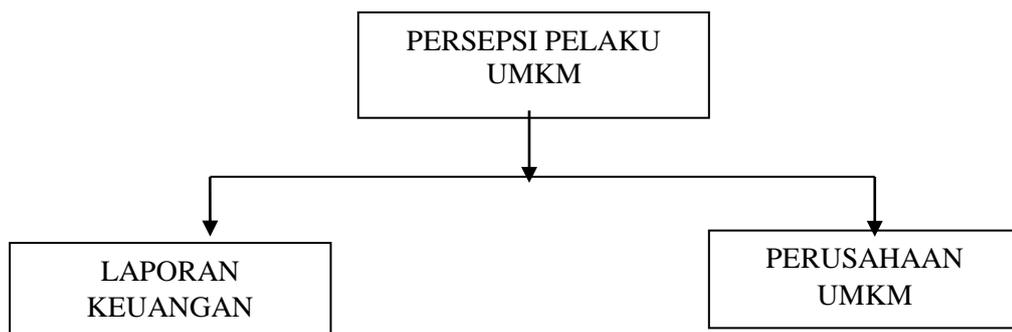
				usahanya dengan baik dari informasi ataupun catatan yang dimiliki saat ini.
8	Wulanditya Putri (2011)	Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPH) Bagi Pengusaha UKM dengan SAK ETAP	Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.	UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan UKM terbukti dapat mengurangi Tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan sumber penerimaan Negara. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha UKM dan sumber penerimaan yang diperoleh, hal tersebut menarik pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak pada sektor UKM. Rencana pemerintah memberlakukan aturan penarikan pajak bagi sektor UKM beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per tahun perlu dipersiapkan, terutama pada pemilik usaha. Pentingnya pemberdayaan UKM mulai dari administrasinya agar dapat membuat laporan keuangan atau pembukuan yang memadai. UKM harus

				<p>dibekali terlebih dahulu cara menghitung keuntungan. Sehingga mereka tidak mengalami kebingungan, ketika harus membayar pajak. Program pemungutan pajak untuk UKM, didukung pula oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menerbitkan SAK ETAP yang membantu UKM untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Perbedaan SAK ETAP dan umum salah satunya terletak pada elemen pajak penghasilan. Pada SAK umum, perusahaan diwajibkan menyajikan pajak kini dan pajak tangguhan. Namun, dalam SAK ETAP hanya perlu menyajikan pajak kini saja.</p>
9	Minuzu Musran (2010)	Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Variabel kinerja Usaha Mikro dan Kecil secara umum menurut persepsi responden Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri atas	Berdasarkan nilai rata-rata (mean) indikator indikator yang memiliki nilai tertinggi pada keseluruhan variabel adalah sebagai berikut : pertumbuhan penjualan (4,37);

		di Sulawesi Selatan	variabel eksogen, dan variabel endogen	lama berusaha/ pengalaman usaha (4,46); penggunaan modal sendiri (4,11); ketersediaan bahan baku (4,43); permintaan pasar (4,17); akses permodalan dan sumber pembiayaan (4,05); pertumbuhan ekonomi (3,98); dan pendampingan (4,12). Kemudian indikator-indikator variabel yang paling rendah nilainya dipresepsikan adalah pertumbuhan keuntungan/laba usaha (2,98); pendidikan formal (3,38); penggunaan teknologi modern dan pengendalian kualitas (3,15); kegiatan promosi yang intensif (3,13); penyiapan lokasi usaha dan informasi pasar (2,83); tingkat pendapatan masyarakat (2,78); dan bantuan permodalan (2,93).
10	Rudiantoro Rizki Siregar Veronica Sylvia	Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek	Disajikan korelasi variabel di Model 1. Variabel persepsi (SME_PERCEPT)	Respoden UMKM dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa

	(2012)	Implementasi SAK ETAP	berkorelasi paling kuat dengan ukuran usaha (SIZE).	pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Faktor ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi tersebut. Lama usaha berdiri justru berpengaruh negative terhadap persepsi, berbeda dengan dugaan awal. Mungkin karena pada saat awal berdiri pengusaha berusaha memikirkan hal-hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan usahanya ke depan sehingga mereka lebih mempunyai persepsi yang baik akan pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan.
--	--------	-----------------------	---	---

### C. Kerangka Pikir



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah atas penggunaan laporan keuangan pada asosiasi UMKM Mutiara Timur Makassar di duga tidak mengembangkan usaha terutama dalam mengelola data laporan keuangan pada perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk tugas akhir ini dilaksanakan pada Asosiasi UMKM Mutiara Timur Makassar yang terletak di Jln. Monginsidi baru AB4/7 Makassar, alasan memilih tempat ini karena salah satu UMKM terbaik dengan mempunyai banyak binaan pelaku usaha.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting dengan tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian.

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi pustaka (*Library Research*), yaitu metode penelitian dengan cara membaca literature, bahan referensi, bahan kuliah dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan (observasi) dan wawancara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan yang dikerjakan (interview)

#### **C. Jenis Data**

1. Jenis data
  - a. Data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan, buku-buku, dan artikel. Data-data ini akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan

atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka memecahkan persoalan yang ada.

- b. Data kuantitatif, analisis yang dilakukan terhadap data yang terbentuk angka dan diperoleh dalam bentuk laporan keuangan.

## 2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan tertulis, baik yang bersala dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis) yaitu mengkaji suatu masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penguraian dalam pembahasan, Maka tulisan ini dibagi kedalam 3 bagian, yang terdiri dari :

## **I. Pendahuluan**

Bagian pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegiatan penulisan.

## **II. Landasan Teori**

Dalam bagian ini di kemukakan teori-teori yang di gunakan sebagai landasan dalam menganalisa masalah yang telah di kemukakan.

## **III. Metode Penelitian**

Bagian ketiga ini terdiri dari lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah tempat penelitian

Latar belakang terbentuknya asosiasi UKM Mutiara Timur, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia, usaha besar satu persatu dinyatakan pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun, PHK terjadi dimana-mana namun berada dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan bahkan cenderung bertambah, kebradaanya mampu berkontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60 persen, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5 persen BPS Tahun 2000, meskipun UKM berkontribusi dan prospek namun UKM masih menghadapi beberapa masalah, baik dari segi internal maupun eksternal yakni,

1. Rendahnya akses pasar untuk produk-produk UKM di Sulawesi selatan.
2. Rendahnya penerapan manajemen keuangan oleh pelaku UKM terhadap aspek legalitas usaha.
3. Rendahnya kualitas produk UKM yang memenuhi aspek standarisasi dan kelayakan produk
4. Lemahnya akses terhadap permodalan
5. Rendahnya penerapan teknologi dalam proses manufaktur UKM
6. Akses informasi terkait permodalan belum merata
7. Kebijakan yang belum berpihak kepada pelaku UKM

8. Daya saing produk yang dihasilkan UKM baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya masih rendah

Hal ini yang mendasari dibentuknya organisasi yang berfungsi dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia demi menekan laju inflasi via aktifitas sebagai added value.

## **B. Visi dan Misi**

### 1. Visi

Menciptakan UKM yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing yang memegang peran strategis dalam perekonomian nasional

### 2. Misi

Wadah konsultasi, fasilitasi, advokasi, mediasi, edukasi, dan layanan informasi usaha bagi UKM demi peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro, kecil dan menengah menuju UKM mandiri yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia demi menekan laju inflasi.



## 1) Ketua Umum

### a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seuruh keputusan–keputusan dan kebijakan–kebijakan organisasi

### b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya

### c. Tugas

1. Memimpin rapat-rapat
2. Mewakili organsasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan
3. Mewakili organisasi untuk mewakili acara tertentu atau agenda strategis lainnya
4. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

## 2) Wakil ketua

### a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijak di seluruh bidang dalam kepengurusan

### b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh bidang dalam kepengurusan

c. Tugas

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam roda organisasi dan Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi
2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

3) Sekretaris

a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi

b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi

c. Tugas

1. Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurus dan Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

#### 4) Bendahara

##### a. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi

##### b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua

##### c. Tugas

1. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi dan Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi
2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

#### 5) Devisi usaha dan standarisasi produk

##### a. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan Ekonomi yang Terkait dengan standarisasi produk mulai dari perencanaan hingga laporan

b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi

c. Tugas

1. Memfasilitasi kebutuhan standarisasi produk pelaku usaha dan Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

6) Divisi organisasi

a. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan

b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan serta mempertanggungjawabkan

c. Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Pendidikan Dan Pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi
2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

#### 7) Divisi informasi dan teknologi

##### a. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan terkait informasi dan teknologi mulai dari perencanaan hingga laporan

##### b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang

##### c. Tugas

1. Merumuskan dan menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas dibidang informai dan teknologi
2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

#### 8) Divisi hubungan masyarakat

##### a. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat serta kemitraan dan kerjasama permodalan mulai dari perencanaan hingga laporan

b. Tanggung jawab

Mengkordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang hubungan masyarakat serta kemitraan dan kerjasama permodalan

c. Tugas

1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Hubungan Masyarakat
2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan organisasi demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi

9) Member

Adalah pelaku usaha sekaligus anggota Asosiasi UMKM Mutiara Timur Makassar

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem akuntansi UMKM di Indonesia**

Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Tidak saja jumlah Umkm di Indonesia mendominasi, tetapi juga UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global. Salah satu tantangan utama dan kongkrit yang dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Ketidak-beresan pengelolaan dana seringkali menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung kegagalan UMKM.

Penerapan akuntansi merupakan langkah mudah tetapi member manfaat luar biasa bagi UMKM. Dengan Akuntansi yang memadai maka UMKM anda dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat-manfaat lainnya yang mungkin tidak anda duga selama ini.

Sistem akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum begitu masif. Masih banyak UKM yang belum menerapkan sistem akuntansi, meskipun jumlah transaksi bisnis yang terjadi sudah begitu banyak. Penerapan sistem akuntansi pada UKM sangatlah penting bagi jalannya usaha. Saat ini masih banyak pengusaha di Indonesia yang tidak menjalankan sistem akuntansi mereka dengan baik. Sebab, banyak pengusaha yang belum begitu mengerti mengenai sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Jika para pengusaha UKM di Indonesia sudah menerapkan sistem akuntansi dengan baik dan benar, maka mereka tidak akan sulit dalam mengembangkan

bisnis yang mereka miliki. Sebab, semuanya sudah terarah dengan baik dan benar. Dalam bisnis UKM, tak banyak yang mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi. Para pebisnis sering sekali mengabaikan penerapan akuntansi karena menganggap akuntansi hanya bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki transaksi cukup banyak. Hal tersebut memang tidak salah, tetapi ada baiknya Anda tetap menerapkan sistem akuntansi, meskipun penerapan sistem akuntansi yang dilakukan sederhana.

Sistem Akuntansi yang bisa diterapkan pada bisnis UKM

Sistem Pencatatan Transaksi

Data akuntansi adalah data-data keuangan usaha yang telah dicatat secara harian. Data ini sangat penting untuk mengetahui jumlah transaksi yang terjadi secara kronologis. Dan akan berfungsi sebagai alat untuk membuat sebuah laporan keuangan diakhir periode akuntansi nanti.

Pencatatan ini penting untuk menghindari adanya kerugian yang besar karena pengelolaan uang yang tidak jelas. Jika Anda seorang pengusaha UKM yang ingin memiliki sistem keuangan yang baik, maka Anda harus bisa melakukan pencatatan keuangan.

Apa Saja yang Harus Dicatat?

Penerapan sistem akuntansi pada bisnis yang tepat akan membantu Anda memiliki laporan keuangan yang sangat berguna bagi berkembangnya bisnis. Ketika melakukan pencatatan ada tiga hal penting yang harus Anda catat secara harian sebagai berikut ;

a. Penjualan

penjualan ini akan sangat penting bagi berjalannya usaha. Dengan memiliki catatan penjualan, maka Anda bisa mengetahui berapa pemasukan yang didapatkan dari total penjualan harian.

b. Pembelian

Catatan lainnya yang tak boleh dilupakan adalah catatan pembelian, catatan pembelian ini penting digunakan untuk mengetahui jumlah uang yang keluar untuk segala jenis pembelian. Baik itu pembelian barang dari supplier, pembelian bahan baku, serta pembelian lainnya yang berkaitan dengan jalannya usaha.

c. Persediaan

Jika Anda merupakan perusahaan dagang atau restoran, pencatatan persediaan sangatlah penting untuk jalannya bisnis. Dengan adanya catatan persediaan, Anda bisa mengetahui secara jelas dan gamblang mengenai barang apa yang sudah habis, dan harus kembali di pesan kepada supplier.

Setelah melalui proses pencatatan, saatnya Anda melakukan pembukuan dengan memasukan seluruh catatan yang Anda miliki ke dalam buku besar. Buku besar berisi catatan perubahan yang terjadi pada akun yang disebabkan oleh transaksi keuangan. Umumnya setiap buku besar berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi kekayaan usaha yang Anda miliki. Itulah pentingnya penerapan sistem akuntansi pada bisnis.

Apa lagi fungsi pembukuan ini sangat penting untuk meringkas semua transaksi yang terjadi berdasarkan golongan-golongan. Umumnya jumlah

dihitung dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sehingga memudahkan Anda sebagai pengusaha untuk menyusun laporan keuangan.

Penerapan sistem akuntansi yang terakhir setelah melakukan semua aktivitas di atas adalah sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada empat jenis, tetapi jika bisnis Anda belum begitu banyak transaksi maka laporan keuangan yang dibuat tidak perlu banyak. Mungkin Anda cukup membuat laporan arus kas dan laporan laba rugi.

Sesuai dengan namanya, laporan arus kas adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui jumlah arus kas selama periode tertentu. Sedangkan laporan laba rugi untuk melihat berapa jumlah laba maupun rugi yang terjadi pada periode tersebut.

Masih banyak masyarakat yang memandang bahwa akuntansi tidaklah penting, dan hanya bisa diterapkan diperusahaan yang sudah tingkat menengah maupun perusahaan yang sudah besar. Padahal tidak, bisnis yang baru dirintis pun perlu menerapkan meskipun transaksi tidak begitu besar, karena ada beberapa manfaat menurut penulis yang bisa di dapatkan. Karena mengingat keuangan merupakan permasalahan yang sangat krusial. Akuntansi bisa melihat sejauh mana perkembangan bisnis seperti di UMKM. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika menerapkan sistem akuntansi yang tepat :

1. Mengetahui jumlah keuntungan ataupun kerugian

Dengan adanya catatan yang berdasarkan pada standar akuntansi, maka akan mengetahui berapa jumlah kerugian dan keuntungan yang didapatkan setiap harinya. Selain itu dapat mengetahui jumlah modal yang sudah dan belum terpakai, mengetahui jumlah utang dan piutang yang dimiliki. Sehingga

semua tercatat rapi dan mengetahui keuntungan baik secara harian, mingguan, bulanan, tiga bulan atau bahkan satu tahun.

## 2. Memudahkan untuk melakukan pinjaman

Ketika UMKM mulai berkembang dan membutuhkan tambahan barang atau jasa yang diproduksi, namun tidak memiliki tambahan modal. Maka laporan keuangan yang dimiliki dapat di ajukan menjadi salah satu syarat. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM adalah salah satunya melalui penyediaan dan pemberian kredit usaha yang bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan bank umum melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyediaan dan pemberian kredit tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan UMKM karena UMKM mendapatkan tambahan modal untuk keperluan usahanya. Namun kenyataan pada saat ini, banyak pelaku usaha UMKM dihadapi dengan persoalan yang mendasar dalam memperoleh kredit itu sendiri, yakni kerap dinilai tidak mampu memenuhi syarat administrasi kredit perbankan (*bankable*), meskipun secara prospek banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (*feasible*). Akibatnya, tidak semua UMKM mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Syarat administrasi kredit perbankan yang seringkali membuat gagal pelaku usaha mendapatkan kredit yaitu karena tidak adanya laporan keuangan usaha yang dimana hal tersebut merupakan salah satu aspek terpenting yang dibutuhkan perbankan untuk mengidentifikasi apakah layak atau tidak mendapatkan kredit.

## 3. Mengetahui posisi keuangan

Setiap usaha yang dijalankan dengan modal tentunya sangat penting mengetahui bagaimana posisi keuangan dari UMKM tersebut, dengan

menerapkan proses akuntansi maka akan mengetahui berapa kas yang dimiliki, berapa asset yang dimiliki, berapa jumlah utang yang harus dibayar, dan yang lainnya pun akan terlihat jelas.

4. Sebagai perencanaan

Dalam UMKM yang mulai berkembang, pembukuan juga digunakan untuk perencanaan kedepan yang cukup baik. Sehingga terkadang, setiap biaya operasional yang digunakan untuk meningkatkan penjualan tidak diketahui berapa jumlahnya. Padahal hal itu merupakan hal yang terpenting untuk keberlangsungan wirausaha, Tanpa hal ini akan sangat sulit melihat kas yang bisa diperoleh dari kegiatan usaha UMKM.

5. Sebagai pengambil keputusan

Meskipun masih dibidang usaha kecil, namun apabila telah menggunakan sistem akuntansi tentunya dapat dengan tepat mengambil keputusan-keputusan yang diambil, contohnya ketika berhadapan dengan permintaan produk yang lebih tinggi, perusahaan dapat melihat perhitungan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila pemasukan perusahaan sedang tinggi maka dapat melakukan pembelian asset untuk meningkatkan produksi.

6. Sebagai alat evaluasi

Sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang dapat menjadikan bahan evaluasi, dari laporan keuangan tersebut dapat melihat strategi pemasaran yang mana yang paling menghasilkan. Pengeluaran mana yang memberikan nilai tambah dan pengeluaran mana yang kurang bernilai

Dari penjelasan di atas maka kita bisa memanfaatkan adanya UMKM yang bisa memajukan perekonomian Indonesia dengan membenahinya melalui pembukuan sistem akuntansi. Pembukuan adalah istilah yang digunakan untuk mewakili aktivitas pengumpulan bukti transaksi, mencatat (menjurnal), mengelompokan (posting), menyusun laporan keuangan. Hal ini mampu meningkatkan kinerja dari UMKM karena manfaat yang didapatkan dari penjelasan diatas. Dengan begitu UMKM di Indonesia pun sudah mulai modern dan bisa bersaing didunia luar. Itulah beberapa manfaat yang bisa didapatkan ketika menerapkan sistem akuntansi pada UMKM, UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Dengan diterapkannya sistem akuntansi pun pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan bantuan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).

## **B. Pemahaman Pelaku UMKM atas Penggunaan Laporan Keuangan**

Pelaku UMKM snack browkis bernama Ibu Musdalifa, peneliti menyempatkan diri untuk bertanya mengenai persepsi Ibu Musdalifa mengenai laporan keuangan untuk usahanya, disamping itu Ibu Musdalifa juga sebagai ketua umum asosisasi UMKM Mutiara Timur Makassar, berperan sebagai pendamping bagi UMKM yang tugasnya adalah membina UMKM. Berikut ini penuturan Ibu Musdalifa mengenai laporan keuangan.

“laporan yang menyajikan alur pemasukan dan pengeluaran uang dalam perusahaan , yang bisa juga menilai kinerja perusahaan, dan laporan itu laba rugi”

Ibu Musdalifa mempersepsikan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan alur masuk dan keluar uang dalam suatu perusahaan, yang bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan untuk menilai kinerja perusahaan,. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Nazlah, pelaku usaha makanan catering kanjitongang food, ketika ditanya mengenai persepsi beliau tentang laporan

keuangan beliau mengatakan bahwa laporan keuangan berfungsi untuk memastikan keadaan perusahaan apakah mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Berikut penuturan lengkap dari beliau

“Laporan keuangan, untuk mengetahui untung ruginya suatu usaha, jadi disitu diperhitungkan pendapatan usaha.”

Jadi, menurut pendapat Ibu Nazlah, gambaran mengenai pendapatan usaha yang sebenarnya dapat diperoleh dari informasi keuangan yang disajikan lewat laporan keuangan. Informasi berikutnya yang peneliti temui adalah Ibu Kurnia, seorang pelaku usaha kripik onde-onde, Ibu Kurnia menjalani usahanya sudah sekitar dua tahunan, berikut persepsi Ibu Kurnia mengenai laporan keuangan.

”Laporan keuangan menurut pandangan Ibu Kurnia adalah laporan yang dapat menjelaskan mengenai pendapatan dan modal yang dibuat dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi.

Sedangkan opini yang didapatkan dari Ibu Musdalifa, Ibu Nazlah dan Ibu Kurnia adalah memang senada, yaitu laporan keuangan sebagai bahan untuk mengetahui gambaran pendapatan dari usaha mereka, termasuk didalamnya tentu mencantumkan laba dan rugi dari usaha mereka. Laporan keuangan adalah yang penting bagi kelangsungan suatu usaha, sebab dengan laporan keuangan, pihak manejer bisa dengan mudah mengevaluasi kinerja keuangan dalam usaha yang mereka jalankan, serta untuk pemilik sendiri dapat memudahkan pemilik untuk melihat posisi pendapatan perusahaan, apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Hal inilah yang diutarakan oleh Ibu Kurnia ketika diwawancarai oleh peneliti, peneliti menanyakan pada beliau apakah laporan keuangan itu penting untuk usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Sambil tersenyum beliau menjawab pertanyaan peneliti dengan opini berikut ini.

“Ibu Kurnia menambahkan bahwa, terkadang apabila kita butuh untuk mengetahui berapa dana yang keluar dari usahanya, maka kita harus membuat catatan keuangan, meskipun hanya catatan sederhana yang bisa kita pahami dengan mudah, contohnya dana untuk listrik, dana untuk pembayaran air, dan beban lain-lain, yang tidak mungkin disebutkan disini”

Senada dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Kurnia, Ibu Musdalifa mengatakan bahwa laporan keuangan sangatlah penting, terutama untuk mengetahui aliran dana yang dikeluarkan oleh kebutuhan usahanya. Berikut pernyataan Ibu Musdalifa terkait hal tersebut.

“Laporan keuangan dapat digunakan juga untuk menetapkan perencanaan pos pos dana yang akan dikeluarkan dimasa mendatang, misalnya perencanaan pembelian bahan baku, tenaga kerja, serta untuk mengetahui total biaya yang dibutuhkan”

Ibu Nazlah juga melanjutkan pengakuannya, bahwa biasanya beliau hanya melakukan pencatatan laporan keuangan menggunakan asumsi saja, mengingat catatan transaksi yang tidak lengkap dilakukannya. Berikut pernyataan Ibu Nazlah terkait hal tersebut.

“Dibuat laporan keuangan cuman asumsi semua, ini kan tidak lengkap pencatatannya, jadi asumsi itu, misalnya pencatatan yang sesuai dengan diperlukan saja kan ini masih pemula nanti kalau sudah besar baru menggunakan sesuai standar akuntansi keuangan.”

Laporan keuangan yang lengkap untuk entitas tanpa akuntabilitas public menurut SAK ETAP (2009, par.3.12) terdiri atas : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Penggunaan Laporan Keuangan. Tujuan laporan keuangan dapat ditinjau dari perspektif informasi dan perspektif prertanggungjawaban. IAI menggunakan dua perspektif tersebut sebagaimana dinyatakan dalam SAK ETAP 2009, par.2.1. (dalam Sodikin dan Riyono, 2012:23). Paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan dari perspektif informasi adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan meliputi hal-hal berikut ini: Posisi keuangan (asset, kewajiban, dan ekuitas), Kinerja (Pendapatan, beban, untung, dan rugi), dan arus kas perusahaan.

Dari uraian diatas, maka hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah belum memahami dan menggunakan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada usahanya. Hal demikian terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan akan ilmu akuntansi dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

### **C. Laporan Keuangan sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan usaha dan mengontrol usaha**

Laporan keuangan berguna untuk digunakan sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan usaha itulah pendapat Ibu Mudalifa mengenai laporan keuangan. Catatan yang dibuat oleh Ibu Musdalifa sebenarnya hanyalah seperti catatan keuangan sederhana, yang berisikan piutang usahanya pada toko-toko tempat beliau menitipkan kuenya, beserta nota-nota kecil yang digunakan beliau sebagai bukti untuk mengambil pendapatan usahanya di toko-toko tersebut. Jadi catatan sederhana yang dibuat Ibu Musdalifa tersebut hanyalah seperti catatan kecil yang berisi jumlah pendapatan dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan. Lebih lanjut, sambil memperlihatkan contoh buku kecil yang beliau gunakan untuk mencatat catatan keuangan sederhananya, Ibu Musdalifa menuturkan bahwa beliau menghitung pendapatan tersebut dengan cara mengurangi jumlah pendapatan dengan beban-beban yang dikeluarkan, itulah hasil akhir usahanya.

“kalau bikin laporan keuangan bisa mengetahui perkembangan usaha, uang ada kamana...”

Ketika ditanyakan pada Ibu Nazlah, beliau mengatakan

“laporan keuangan sederhana untuk mengontrol perkembangan usaha”

Dilain sisi Ibu Kurnia berpendapat

“bahwa dengan membuat laporan keuangan bisa mengontrol usaha sendiri”

Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan terdapat elemen-elemen yang menjelaskan posisi keuangan, seperti neraca yang menjelaskan posisi harta, utang dan modal secara utuh, sejalan dengan hal itu, terdapat juga laporan laba rugi yang bisa menjelaskan posisi pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi perusahaan, serta jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan.

Menurut Sodikin dan Riyono (2012:4) Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak pemilik dan menejer, untuk pihak pemilik sendiri laporan keuangan berfungsi sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan usaha atau dalam hal ini posisi keuangan dalam periode tersebut. Lebih lanjut masih menurut Sodikin dan Riyono (2012:4) laporan keuangan sangat bermanfaat bagi manajemen utamanya untuk melindungi asset dan sebagai bahan untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan yang dipercayakan kepadanya.

Sesuai dengan kenyataan dilapangan dan teori, maka hasil pembahasan penelitian ini adalah bagi pelaku UMKM laporan keuangan berfungsi sebagai bahan untuk melihat perkembangan usaha serta mengontrol usaha mereka.

#### **D. Laporan Keuangan itu “rumit” dan membuang-buang waktu**

Pada saat ada pembeli yang memesan satu bungkus snack, maka transaksi tersebut dicatat dalam nota yang telah tersedia. Nota-nota tersebut dikumpulkan dan disimpan dengan rapi. Hal tersebut peneliti temukan pada usaha Snak

Browkies usaha milik Ibu Musdalifa, berikut penuturan Ibu Musdalifa selaku pemilik tersebut.

“cuman kita tidak pakai manejer, ada tertulis tapi tidak harus wajib membuat laporan keuangan, jadi yang dicatat cuma pemasukan sama pengeluarannya.”

Ibu Musdalifa menuturkan bahwa dalam usahanya beliau tidak menggunakan jasa manejer, jadi transaksinya hanya sekedar dicatat saja tanpa harus membuat laporan keuangan, jadi intinya yang dicatat oleh Ibu Musdalifa adalah sekedar jumlah pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam usahanya saja. Disisi lain Ibu Nazlah mengakui juga kesibukan untuk mengurus usahanya juga adalah salah satu alasan yang membuat beliau tidak membuat laporan keuangan. Ibu Nazlah berpendapat bahwa membuat laporan keuangan adalah hal yang merepotkan sedangkan disisi lain ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Berikut pengakuan beliau pada peneliti.

“kalo saya pernah diminta laporan keuangan, saya ini kan jualan dan banyak persaingan, itu repot, saya ada banyak pekerjaan, mungkin juga pendapatan yang tidak menentu.”

Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Ibu Kurnia selaku pelaku usaha UMKM. Menurut Ibu Kurnia lebih baik beliau mengatur penjualan, mengontrol konsumen serta mengatur karyawannya, jadi lebih baik melakukan semua hal tersebut dibandingkan membuat laporan keuangan yang membutuhkan banyak waktu. Berikut pernyataan Ibu Kurnia terkait hal tersebut.

"Ini hal yang sulit, cara menjual, saya harus mengendalikan Pelanggan, jadi jika saya harus membuat laporan keuangan, itu membutuhkan banyak waktu.".

Menurut pendapat Widodo dan Kurnianto (2012 : 208) dalam penelitiannya, bahwa sebagian besar pelaku UMKM memahami bahwa laporan keuangan atau pencatatan keuangan usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Maka hasil pembahasan penelitian ini adalah umumnya pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan disebabkan karena mereka menganggap adalah hal yang rumit, sulit, dan merepotkan.

#### **E. Catatan Keuangan sederhana sebagai alternative pengganti laporan keuangan**

Umumnya laporan keuangan yang disajikan secara utuh, mulai dari menjurnal transaksi sampai memposting ke buku besar dan hingga sampai proses akhir penyajian sangatlah memberatkan bagi para pelaku UMKM. Olehnya itu, pelaku UMKM yang memilih catatan keuangan sederhana sebagai alternative pengganti laporan keuangan. Alternative pengganti tersebut ternyata hanya seperti catatan yang dibuat khusus transaksi harian untuk usaha mereka, seperti barang apa saja yang laku terjual, kemudian jumlah barang yang terjual dalam sehari, serta harga barang. Kenyataan ini terjadi pada pelaku UMKM yang peneliti kunjungi. Berikut ini, hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musdalifa selaku pelaku usaha Snack Browkies.

“Sebenarnya saya membuat cara yang sederhana, saya hanya tahu bagaimana jumlah yang keluar hari ini, berapa rupiah yang mengalir dalam sehari, jadi jika saya hanya membuat catatan sederhana itu dalam bentuk laporan keuangan laba dan rugi”

Ibu Musdalifa menjelaskan bahwa beliau hanya menggunakan cara sederhana dalam pencatatan keuangan di dalam usahanya, tidak seperti dengan laporan keuangan yang sesuai standar, dia hanya menuliskan atau mencatat berapa banyak yang terjual dalam sehari, dan berapa banyak rupiah yang keluar dalam sehari, serta uang tersebut dikemanakan atau digunakan untuk apa, pada intinya beliau tidak membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, hanya catatan keuangan sederhana saja. Hal yang senada juga

terjadi pada pelaku UMKM Ibu Nazlah, beliau mengutarakan bahwa beliau hanya membuat catatan keuangan biasa saja, tanpa harus membuat laporan keuangan. Berikut penuturan beliau.

“ada tertulis tapi kan tidak harus wajib membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.”

Ketika ditanyai persepsi Ibu Kurnia mengenai pencatatan keuangan yang diterapkannya untuk usahanya, beliau mengakui bahwa beliau hanya menggunakan pencatatan sederhana untuk UKM, yang bersumber dari buku yang pernah beliau baca. Seperti, pencatatan laporan laba rugi. Berikut pengakuan Ibu Kurnia kepada peneliti.

“sederhananya UKM, saya membuat laporan sederhana saja bagaimana persoalan laba dan rugi, inikan masih usaha kecil jadi belum lengkap dan laporan keuangan laba rugi sebagai alternative pencatatan sederhana”

Menurut PSAK yang berlaku, laporan keuangan yang harus dibuat oleh sebuah entitas antarlain Neraca, laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Begitu juga yang terdapat dalam SAK ETAP yang standarnya telah ditetapkan sejak tahun 2009. Namun, yang terjadi dilapangan terkadang pelaku UMKM hanya menulis transaksi yang diperlukan saja. Seperti rincian pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan sendiri hanya seperti pencatatan piutang, dan barang-barang yang laku terjual dalam sehari. Sedangkan untuk pengeluaran sendiri, pelaku UMKM hanya mencatat beban-beban yang dikeluarkan, yang sering mereka sebut sebagai modal. Umumnya, mereka menganggap dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan untuk kelangsungan usaha mereka adalah modal. Padahal modal bukan hanya adalah setorang pertama yang digunakan untuk menjalankan usaha akan tetapi modal juga dapat berupa bahan dan alat yang

disetorkan pertama kali untuk menjalankan usaha. Modal dapat bertambah dan berkurang apabila terdapat penambahan laba. Modal menurut SAK ETAP 2009 adalah hak residual atas entitas (perusahaan) setelah dikurangi semua kewajibannya.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah UMKM menggunakan pencatatan keuangan sederhana sebagai alternative pengganti laporan keuangan pelaku UMKM hanya menulis transaksi yang diperlukan saja. Seperti rincian pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan sendiri hanya seperti pencatatan piutang, dan barang-barang yang laku terjual dalam sehari. Sedangkan untuk pengeluaran sendiri, pelaku UMKM hanya mencatat beban-beban yang dikeluarkan, yang sering mereka sebut sebagai modal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah atas penggunaan laporan keuangan pada asosiasi mutiara timur makassar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi pelaku UMKM atas penggunaan laporan keuangan adalah pelaku UMKM yang ada di asosiasi UMKM Mutiara Timur Makassar belum memahami laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan, laporan keuangan berfungsi sebagai bahan untuk melihat perkembangan usaha serta mengontrol usaha mereka, pencatatan keuangan sederhana sebagai alternative pengganti laporan keuangan.

#### **B. SARAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi pelaku UMKM. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku UMKM agar segera menerapkan laporan keuangan bagi usahanya, agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Ngadiman, Sohidin. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jupe UNS*, Vol 2, No 2. P: 135-147
- Andriani, Atmadja, Sinarwati. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol.2, No.1.
- Kristayani, Mimba. (2014). Evaluasi Penerapan Sak Etap Atas Persediaan (Studi Kasus Pada PT. WKPI). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.1. P: 120-139.
- Pratiwi, Sondakh, Kalangi. (2014). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.3. P: 254-265
- Siswanto, Sadjiarto. (2014). Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Industri Kulit Di Surabaya. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*. VOL 4, NO 2. P:1-9
- Agnes, Sawir. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Perusahaan. PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Khotimah, Khusnul. 2010. Hubungan antara Persepsi terhadap Lingkungan Kerja Psikologis dengan Burnout pada Perawat RSUD Budi Rahayu Pekalongan. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Minuzu Musran. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol.12, No.1, P: 33-41
- Musmini Sri Lucy. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil. *VOKASI Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 2 No.1, P: 62-81
- Rizki Rudiantoro,Sylvia Veronica Siregar. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*,Vol.9, No.1, P: 1-21.
- Rudiantoro Rizki, Siregar Veronica Sylvia. (2012). Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.9, No.1, P: 1-19.
- Siboro, Danri Toni. 2006. Persepsi Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik yang Berafiliasi dan Non-Afiliasi terhadap Efektivitas Metode-Metode Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris di DKI Jakarta). Universitas Diponegoro

Suprayitno Bambang. (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.4, No.2, P: 14-35

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Wulanditya Putri. (2011). Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPH) Bagi Pengusaha UKM dengan SAK ETAP. Pamator, Vol.4, No.2, P: 155-163